

MENUJU PEMILU 2024
Belajar dari Kompleksitas Pemilu Serentak 2019

Penulis:

Prayudi, Novianto Murti Hantoro, Aryojati Ardipandanto,
Anin Dhita Kiky Amrynudin, Juniar Laraswanda Umagapi,
Rais Agil Bahtiar, Aryo Wasisto

Editor:

Dr. A. Bakir Ihsan, MSi.



PT. PENA PERSADA KERTA UTAMA

MENUJU PEMILU 2024

Belajar dari Kompleksitas Pemilu Serentak 2019

Penulis:

Prayudi, Novianto Murti Hantoro, Aryojati Ardipandanto,
Anin Dhita Kiky Amrynudin, Juniar Laraswanda Umagapi,
Rais Agil Bahtiar, Aryo Wasisto

ISBN: 978-623-167-214-8

Editor:

Dr. A. Bakir Ihsan, MSi.

Design Cover:

Retnani Nur Brilliant

Layout:

Eka Safitry

PT. Pena Persada Kerta Utama

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan,
Kab. Banyumas Jawa Tengah.

Email: penerbit.penapersada@gmail.com

Website: penapersada.id. Telp (0281) 7771388

Penerbitan Buku ini Atas Kerja sama
Pusat Analisis Keparlemenan Sekretariat Jendral
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jln. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270 Telp (021)5715
349 fax (021)5715 423 / 5715 925, Website : www.dpr.go.id

Anggota IKAPI: 178/JTE/2019

All right reserved

Cetakan pertama: 2023

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin
penerbit

Pengantar Editor

Menuju Pemilu Serentak Berkualitas

Pemilu menjadi jalan penentu arah demokrasi. Daya tahan demokrasi tergantung pada kualitas pemilu yang dijalankan secara jujur, adil, dan terbuka pada koreksi baik sebagai langkah antisipasi maupun solusi. Kesediaan membuka diri atas koreksi adalah modal penting untuk memperkuat kualitas pemilu sebagai fondasi konsolidasi demokrasi.

Salah satu problem yang sering muncul dalam pemilu adalah proses pelaksanaan kampanye dengan segala kaitannya. Dalam beberapa kasus, kampanye menjadi jalan efektif untuk memastikan raihan kursi untuk pengisian posisi di lembaga legislatif, pun di eksekutif. Pelaksanaan pemilu di Indonesia mengalami dinamika mengikuti langgam rezim yang hadir. Kebebasan yang tersaji di awal kemerdekaan menjadi tonggak sejarah demokrasi yang tumbuh melalui Maklumat X tentang pendirian partai politik yang kemudian dirayakan dengan Pemilu 1955.

Dalam pencarian sistem kenegaraan, termasuk penguatan fungsi partai, dalam sejarahnya sempat terjebak dalam sistem yang oleh Guillermo O'Donnell disebut sebagai otoritarianisme birokratik yang memproduksi pemilu sebatas legitimasi demokrasi basa-basi. Pemilu dirayakan sebagai mesin status quo yang sekaligus mematikan fungsi substantif demokrasi sebagai jalan kehidupan suara warga negara. Namun sebagaimana optimisme Bung Hatta, yang membuka kran tumbuhnya partai politik melalui Maklumat X di awal Indonesia merdeka, bahwa demokrasi tidak akan pernah mati di Republik ini karena demokrasi adalah nyawa warga. Demokrasi dengan beragam degradasinya terus bergerak sampai pada era reformasi yang diyakini sebagai tonggak kembali pada fitrah demokrasi.

Sejak reformasi, pencarian bentuk terbaik demokrasi yang bernafas dalam kebebasan, kesetaraan, ketaatan, dan kedaulatan rakyat, mengalami reformulasi untuk menguatkan substansi. Pemilu awal reformasi (1999) yang memilih para wakil untuk kemudian para wakil menentukan kepemimpinan nasional, pada 2004 berubah

menjadi pemilihan langsung. Suara rakyat diwujudkan dengan pemberian kuasa pada rakyat untuk memilih secara langsung pemimpin yang diharapkan. Pemilu 2004 menjadi tonggak awal suara rakyat sebagai kuasa rakyat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Begitu juga pada level daerah, pada 2005 untuk pertama kalinya dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Walaupun sempat muncul aspirasi untuk kembali ke model perwakilan, namun tak berlanjut karena pemilihan langsung dirasa lebih memberi makna dalam konteks memilih daripada melalui perwakilan.

Langkah-langkah konstruktif sebagai ikhtiar untuk mengefektifkan pelaksanaan pemilu dan mendekatkan suara kedaulatan rakyat terus dilakukan. Atas pertimbangan waktu pelaksanaan terhadap seluruh mekanisme pemilu, maka pada pemilu 2019 untuk pertama kalinya dilaksanakan pemilihan secara serentak dengan 5 kontak, yaitu pemilihan presiden-wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten/Walikota. Langkah ini dianggap berhasil dengan beberapa implikasi tragis, yaitu jatuhnya korban petugas KPPS mencapai ratusan orang meninggal dan dirawat karena kelelahan. Demokrasi bertumbal korban yang tak terduga. Pemilu 2024 kembali menggelar pemilu serentak bahkan dengan cakupan tambahan, yaitu dari 5 kotak menjadi 6 kotak dengan penambahan pemilihan kepala daerah. Walaupun dilaksanakan pada bulan yang berbeda dalam tahun yang sama, namun tetap memerlukan antisipasi agar efek tak terduga tidak terjadi atau paling tidak dapat diminimalisasi.

Buku ini hadir untuk menerangi sisi gelap pemilu serentak 2019 sebagai catatan dan pengingat agar pemilu 2024 terlihat lebih terang dan menyenangkan. Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi 2 (dua) contoh untuk dilihat sisi penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019. Namun demikian, catatan penting untuk diantisipasi dalam setiap perhelatan kampanye adalah peluang terjadinya gesekan antara pendukung partai politik. Seperti biasa, dalam beberapa kampanye umum di Yogyakarta, bentrok terjadi antara kelompok merah dan kelompok hijau yang merepresentasikan perbedaan dukungan. Hal

ini bisa terjadi di tempat lain karena adanya keragaman latar belakang sosial yang tidak jarang mengkristal menjadi identitas emosional. Sementara di Bangka Belitung terjadi penyimpangan dan pelanggaran, salah satunya adalah “sumbangan” yang salah tempat. Penyimpangan ini tidak khas terjadi di Bangka Belitung, karena seperti menjadi pengetahuan umum bahwa setiap mendekati hari pemilihan, terdapat intimasi antara calon dengan masyarakat dengan segala “kebaikan” dadakan yang diberikan. Ada yang tertangkap sebagai pelanggaran, ada yang aman dari sanksi penyimpangan.

Dari beberapa kasus yang terjadi di dua wilayah tersebut melahirkan beberapa solusi sebagai langkah perbaikan, paling tidak untuk tidak terjebak pada jurang penyimpangan yang sama. Mulai pentingnya partisipasi masyarakat dalam ikut mengontrol jalannya pemilu sampai pada proses penindakan oleh lembaga terkait terhadap pelanggaran yang terjadi agar lebih efektif, menjadi bagian yang tersaji dalam buku ini. Dengan demikian, buku ini menjadi penting untuk memastikan pemilu 2024 lebih baik lagi karena terbuka pada koreksi dan menjalankan solusi.

Membaca urgensi antisipasi dan solusi atas beragam agenda pemilu serentak, buku ini terlalu tipis untuk menjelaskannya. Karena itu, buku-buku serupa sangat diperlukan untuk melengkapi ikhtiar peningkatan kualitas substansi pemilu kita.

A. Bakir Ihsan

Kata Pengantar Penulis

Persiapan Pemilu serentak 2024 tidak dapat dilepaskan dari perjalanan pemilu-pemilu sebelumnya di Indonesia, terutama setelah memasuki era reformasi 1998. Pemilu 2019 menjadi tonggak baru bagi sejarah politik elektoral bangsa Indonesia, karena untuk pertama kalinya pemilihan presiden-wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan secara serentak nasional. Keserentakan Pemilu 2019 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 14/PUU-XI/2013. Dalam perkembangannya, lahir Putusan MK berikutnya, yaitu Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang memberikan arah baru bagi penyelenggaraan pemilu. Hal yang menarik dalam Putusan MK ini adalah pelaksanaan Pilkada yang digabung dengan pelaksanaan Pemilu.

Pelaksanaan pemilu dan Pilkada 2024 secara serentak perlu belajar dari pengalaman Pemilu 2019. Pembelajaran ini penting, karena selain adanya kesamaan dalam hal keserentakan, juga adanya implikasi-implikasi tak terduga pada Pemilu 2019 yang dapat diantisipasi dan diminimalisasi agar tidak terjadi kembali dalam Pemilu 2024.

Buku ini merupakan hasil dari kegiatan pengumpulan data di tahun 2022 yang mencakup pembahasan dari setiap unsur penyelenggara dan pihak terkait. Buku ini dimaksudkan untuk melihat lebih detail pelaksanaan pemilu 2019 daripada sekadar liputan media massa secara umum. Untuk itu, diharapkan pembaca buku ini bisa melihat beberapa hal yang tidak saja secara substansi bisa berpengaruh pada kualitas pemilu yang diselenggarakan, tetapi juga bagaimana hal-hal teknis atau sederhana sekalipun juga bisa menjadi kendala tersendiri dengan peluang alternatif yang bisa dijalankan.

Demikian dan terima kasih

Tim penulis buku kelompok 2023
(Tema: Menuju Pemilu 2024)

Daftar Isi

Pengantar Editor	iii
Kata Pengantar Penulis.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Prolog	1
BAB I Pendahuluan.....	4
A. Latar Belakang Masalah.....	4
B. Permasalahan	14
C. Penyelenggaraan Pemilu yang substantif.....	15
D. Upaya Mengidentifikasi Persoalan	16
BAB II PENGALAMAN DAN ANTISIPASI KAMPANYE PEMILU SERENTAK	18
A. Problem Kampanye Pemilu	18
B. Antisipasi dan Solusi.....	20
BAB III KENDALA PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU.....	34
A. Fakta Temuan di Lapangan.....	34
B. Beberapa Kendala yang Dihadapi	47
BAB IV ANTISIPASI PILKADA SERENTAK	75
A. Kekosongan Jabatan Kepala Daerah untuk Keserentakan Pemilu Kepala Daerah 2024	75
B. Kriteria dan Ketersediaan untuk Mengisi Penjabat Kepala Daerah.....	84
C. Kesiapan Daerah.....	91
BAB V KERAWANAN KEAMANAN PENYELENGGARAAN DI LAPANGAN	102
A. Potensi Konflik Identitas dalam Kampanye di Yogyakarta	102
B. Kampanye Hitam dalam Pemilu di Bangka Belitung ...	105
BAB VI ANGGARAN PEMILU DAN DESAIN SURAT SUARA PEMILU.....	108
A. Anggaran Pembiayaan Pemilu.....	108
B. Efisiensi Anggaran; Penyederhanaan Kertas Suara	113
BAB VII PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan	121
B. Rekomendasi.....	125

Epilog	130
DAFTAR PUSTAKA	132
Biodata Editor	134
Biodata Penulis.....	135

Prolog

Pemilu serentak 5 kotak (5 jenis pemilihan sekaligus, ed.) tahun 2019 merupakan pengalaman berharga bagi pihak penyelenggara, utamanya KPU dan Bawaslu, dalam persiapan penyelenggaraan pemilu serentak di tahun 2024. Bahkan bukan hanya bagi pihak penyelenggara dan pemerintah sebagai pemegang otoritas, tetapi untuk semua komponen bangsa Indonesia dalam rangka mempersiapkan sekaligus mengantisipasi berbagai kemungkinan tantangan dan peluang yang dihadapi pada pemilu 2024.

Pemilu 2019 dengan jadwal dan tahapannya yang tergolong sangat ketat telah berdampak pada jatuhnya korban dari pihak penyelenggara di lapangan, utamanya bagi petugas kelompok penyelenggara dan pemungutan suara (KPPS) yang mencapai 894 orang meninggal dan 5.175 orang mengalami jatuh sakit. Kejadian ini sempat menjadi perbincangan publik yang hangat dalam upaya penyelesaian masalahnya, termasuk pentingnya pemberian jaminan kesehatan bagi pihak penyelenggara, terutama bagi petugas di lapangan. Tetapi tampaknya kejadian tragis jatuhnya korban penyelenggara pemilu 2019, tidak terlampaui kuat menggugah untuk melahirkan gagasan konstruktif dan antisipatif dalam konteks penanganannya lebih lanjut agar tidak kembali terjadi di pemilu selanjutnya, yaitu pemilu 2024. Padahal, Pemilu 2024 memiliki cakupan kerja yang lebih luas karena tidak hanya terjadi di seputar 5 kotak, yaitu memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, tetapi berlanjut di tahun yang sama dengan agenda Pilkada.

Meskipun PKPU dalam konteks persiapan tahapan Pilkada 2024 serentak nasional belum dibahas dalam konsultasi KPU dan DPR RI, tetapi jelas bahwa pemilihan kepala daerah-wakil kepala daerah sebagai bagian dari agenda Pemilu 2024 lebih berat dibandingkan agenda Pemilu 2019. Adapun agenda ini sudah terbaca sejak awal, karena pemilihan gubernur-wakil gubernur, walikota-wakil walikota, dan bupati-wakil bupati, rencana

pelaksanaannya pada November 2024 sudah sesuai ketentuan di UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemilu 2019 sendiri sudah menunjukkan karakteristik kompleksitas penyelenggaraannya yang tergolong tinggi resiko dan sekaligus keperluan dukungan sumber daya yang tergolong mahal. Itu sebabnya, bagi pihak penyelenggara di daerah dengan konsekuensi beban kerja, waktu yang ketat, dengan tekanan politik yang sewaktu-waktu bisa terjadi dan mempengaruhi sampai tingkat tertentu kemandiriannya sebagai institusi yang bersifat nasional, maka inovasi tanpa menyalahi aturan pengadaan sumber dayanya, sangat dibutuhkan sebagai langkah antisipatif. Meskipun beberapa pihak penyelenggara Pemilu di daerah, seperti KPU dan Bawaslu setempat menjalin kerjasama dengan pihak pemangku kepentingan terkait dan proses pendampingan oleh KPU RI di tingkat pusat guna penanganan tahapan, tetapi tantangan setiap tahapan di Pemilu 2019 terbukti nyata tidak mudah diselesaikan.

Substansi dari kompleksitas penyelenggaraan pemilu di atas, coba ditelusuri lebih lanjut dari beberapa Analisis Legislatif di Pusat Penelitian, Badan Keahlian Setjen DPR RI melalui kegiatan pengumpulan data di tahun 2022. Kegiatan pengumpulan data ini dilakukan di lapangan, yaitu dengan mengacu pada kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Bangka Belitung. Dengan mendeskripsikan beberapa dari tahapan pemilu pada kasus-kasus Pemilu 2019 di kedua daerah itu, buku kategori kerja kelompok ini mencoba memetakan kesiapan dan antisipasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggaranya, terutama KPU dan Bawaslu setempat. Beberapa substansi terkait dianalisis dalam konteks kampanye dengan dinamika yang menjadi tantangannya, skema penanganan pelanggaran, soal keamanan dari penyelenggaraan di lapangan, dan soal antisipasi kekosongan jabatan beberapa kepala daerah dan kebutuhan pengisian pejabat pengganti sementara.

Kompleksitas demokrasi pemilu dengan segala tantangannya dapat diibaratkan sebagai bangunan awal bagi pembentukan pemerintahan dalam arti yang luas dengan segala esensi tanggung

jawabnya dalam menjawab prinsip kedaulatan rakyat. Esensi tanggungjawab dimaksud tidak semata-mata sudah pasti pada interaksinya dengan politik di tingkat lokal, tetapi juga menjangkau bidang kehidupan nasional dalam arti luas, yaitu mengenai ekonomi, sosial, keamanan, dan masa depan politik bangsa Indonesia dengan segala tantangan yang dihadapi.

Epilog

Penyelenggaraan pemilu serentak 2019 menjadi pelajaran penting dalam rangka menghadapi pemilu serentak 2024. Kesiapan pelaksanaan tahapannya tidak saja menjadi tanggung jawab dari pihak penyelenggara, tetapi juga dari pemerintah dan berbagai komponen di masyarakat. Ini menegaskan, penyelenggaraan pemilu adalah tidak sekadar memenuhi asas luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia), tetapi juga berjalan secara jujur (jujur dan adil). Konsekuensi atas keterlibatan berbagai kalangan dalam pemilu, menempatkan status kemandirian penyelenggara pemilu, utamanya KPU dan Bawaslu, adalah strategis bagi kualitas pemilu itu sendiri.

Kualitas pemilu yang mampu dijaga akan memberikan kontribusi signifikan bagi indeks demokrasi Indonesia yang beberapa tahun pemerintahan hasil Pemilu 2019 menunjukkan penurunan. Terlepas dari kontribusi dimaksud, maka serangkaian pekerjaan rumah masih harus dilakukan oleh Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Langkah-langkah ke arah perbaikan dalam kerangka reformasi pemilu tidak hanya sebatas pada tataran regulasi, perangkat pendukung infrastruktur primer dan sekunder di lapangannya, tetapi juga harus menjangkau pada pembentukan budaya politik yang kondusif. Ini artinya dukungan dari segi struktural kelembagaan, penganggarannya, juga harus dibarengi oleh pelaksanaan fungsi pendidikan politik bagi masyarakat secara tepat sasaran.

Pendidikan politik bagi peningkatan literasi pemilih bukan saja dalam skema pembentukan kampanye yang searah bagi adu gagasan dan program serta menjauhi kampanye hitam, tetapi lebih luas lagi bagi skema kepentingannya. Hal ini tidak lagi sekadar perwujudan kedaulatan rakyat yang tetap terjaga sejak perencanaan pemilu dilaksanakan, tahapan-tahapannya dijalankan setelah disepakati dan kemudian juga sebagai awal membentuk pemerintahan yang efektif dalam menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya setelah hasil pemilu diperoleh dan dilantiknya para kandidat terpilih. Masyarakat bukan hanya penonton atau kalau

berpartisipasi sebatas di bilik suara menggunakan hak pilihnya, tetapi juga berpartisipasi secara luas di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, juga sepanjang kerja pemerintah yang dipilih secara demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu Provinsi Bangka Belitung (2019), *Mengawal Pesta Demokrasi: Pemilu Serentak 2019 di Bangka Belitung (sebuah Catatan Kinerja)*, Pangkal Pinang.
- Clark, A. (2019). The cost of democracy: The determinants of spending on the public administration of elections. *International Political Science Review*, 40(3), 354–369. <https://doi.org/10.1177/0192512118824787>
- Gafar, Afan (2000), *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi Usman (5 Maret 2019). “Polresta Yogya Petakan Daerah Rawan Konflik Pemilu, Ini Hasilnya.” <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4454263/polresta-yogya-petakan-daerah-rawan-konflik-pemilu-ini-hasilnya> diakses pada 8 April 2022. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4454263/polresta-yogya-petakan-daerah-rawan-konflik-pemilu-ini-hasilnya> diakses pada 8 April 2022.
- Isra, Saldi (2019), *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- James, T. S. (2019). Better workers, better elections? Electoral management body workforces and electoral integrity worldwide. *International Political Science Review*, 40(3), 370–390. <https://doi.org/10.1177/0192512119829516>
- Kompas* 16 April 2022.
- Kompas*, 3 September 2021.
- Laporan Tertulis KPU Yogyakarta 2022.
- Laporan tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019, Bangka Belitung: Bawaslu Provinsi Bangka Belitung.
- Minan, Ashanul, et al (Editor) (2020), *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019*, Jakarta: Bawaslu.
- PPID.KASN.go.id, 2020
- Republika*, 27 Januari 2022.
- Sujito, Arie (2022). “Pertaruhan Pemilu Serentak 2024”, bahan disampaikan dalam FGD Pengumpulan Data Persiapan Pemilu Serentak 2024, Yogyakarta.

- Sukmajati, Mada (2022). Presentasi dalam FGD “Pengumpulan Data Persiapan Pemilu Serentak 2024 dan Kompleksitas Penyelenggaraannya,” Yogyakarta, 24 Februari.
- Thantowi, Pramono U. (2022). “Penyelenggaraan Pemilu 2024: Strategi dan Persiapan” dalam FGD dengan Tim Pengumpulan Data Puslit BKD Setjen DPR RI, 15 Februari.
- Wasisto, A. (2021). Voter Confusion in Surabaya: The Problem of Ballot Design and Incompetence [Kebingungan Pemilih di Surabaya: Masalah Desain Kertas Suara dan Inkompetensi]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 12(2), 105–119. <https://doi.org/10.22212/jp.v12i2.2286>

Biodata Editor

Dr. A. Bakir Ihsan, MSi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Beliau Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2015 dan aktif menulis berbagai publikasi ilmiah baik di terbitan luar negeri dan dalam negeri.

Biodata Penulis

Anin Dhita Kiky Amrynudin, menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro pada tahun 2013 dan melanjutkan S2 Magister Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro pada tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama di Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: “Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru SD di Kabupaten Tegal” (2013); “Evaluasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang” (2015); “Netralitas ASN dalam Pemilu Serentak 2019” dalam buku *Evaluasi Pemilu Serentak 2019*. (2019); “Problematika Online Single Submission (OSS) dalam Mendukung Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia” (2019); “Potensi Politisasi dalam Pilkada di Masa Pandemi Covid-19” dalam *Buku Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19: Peluang dan Tantangan Penyelenggaraannya*. (2020); “Upaya Peningkatan Indeks of Doing Business (EoDB) Melalui Penataan Deregulasi Kebijakan” dalam *Buku Reformasi Birokrasi Era Pemerintahan Joko Widodo*. (2021); “Relasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kebijakan Satu Data Indonesia” dalam *Buku Kebijakan Satu Data Indonesia*. (2022). Penulis dapat dihubungi di anin.amrynudin@dpr.go.id.

Aryojati Ardipandanto

Menyelesaikan Pendidikan sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan dari Universitas Langlangbuana (Yayasan Brata Bhakti Polri) Bandung pada tahun 2003. Kemudian menempuh Pendidikan Pascasarjana (S2) Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas), Jakarta dan menyelesaikan studi Pascasarjana (S2) nya tersebut, pada tahun 2023. Penelitian-penelitian yang dilakukannya terkait dengan masalah-masalah pemerintahan, politik, dan industri pertahanan. Ia pernah menjadi Tim Asistensi Penyusunan RUU tentang Industri Pertahanan, yang sudah disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Selain itu, penulis adalah anggota tim

Pidato Sekretariat Jenderal DPR RI sejak 2011 hingga sekarang. Ia juga turut menjadi anggota Tim Buku Kinerja DPR RI.

Aryo Wasisto

Gelar sarjana humaniora diraih di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan gelar Magister ilmu politik didapat dari Universitas Nasional, Jakarta. Menulis beberapa topik penelitian berkaitan dengan perilaku pemilih, partai politik dan pemilihan. Beberapa tulisannya di jurnal antara lain berjudul: Electoral Volatility of The 2019 Presidential Election; A Study in Jakarta and Depok (2021), The Role of Access Capacity of Business Actors in the New Normal Policy Congruence in Indonesia (2021), dan "Institutional Disaffection: The Role of Political Sophistication in Evaluating Parliament in Indonesia (2020). Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama, Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI.

Juniar Laraswanda Umagapi

Juniar Laraswanda Umagapi S.IP.,M.A lahir di Tidore, 13 Juni 1993. Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2014 dan Pendidikan S2 Ilmu Politik di National Research University Higher School of Economics Moscow Rusia pada tahun 2017. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama di Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI

Novianto Murti Hantoro

Menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 1995 dan Pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum dengan program kekhususan Hukum dan Kehidupan Kenegaraan di Universitas Indonesia pada 2004. Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Pelanggaran Hukum Pemilu dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 (2014), "Mewujudkan Kepastian Hukum dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Menghentikan Praktek Hukum Liberal (2015), dan Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara:

Permasalahan Kategori Pejabat Negara” (2016). Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Madya di Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI.

Prayudi

Tempat/ Tanggal Lahir: Bogor, 21 November 1965

Lulus S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Nasional, 1989

Lulus S2 Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, 2004

Tidak lulus/ pernah menempuh Pendidikan S3 Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, 2011-2018.

Penulis buku individu, buku tim, dan jurnal serta Anggota Redaksi di beberapa terbitan Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Utama di Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI.

Rais Agil Bahtiar

Menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2015 dan langsung melanjutkan pendidikan S2 Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2018 dengan tesis berjudul “Implementasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (Studi di Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Timur, dan Purwokerto Barat). Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Muda di Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI.